

**Edukasi Publik Lintas Sektor tentang Kemiskinan, Pengangguran, dan
Kriminalitas untuk Mendorong Kesadaran Pembangunan Ekonomi
Berkelanjutan di Mandailing Natal**

***Cross-Sector Public Education on Poverty, Unemployment, and Crime to Promote
Awareness of Sustainable Economic Development in Mandailing Natal***

Jureid^{1*}, Mufti Fahrizal Harahap², Faisal Affandi³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Korespondensi penulis: jureid@stain-madina.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 26 September 2025

Revisi: 30 September 2025;

Diterima: 22 Oktober 2025;

Tersedia: 24 Oktober 2025.

Keywords: Community

Empowerment; Criminality;

Poverty; Sustainable Development;

Unemployment.

Abstract. This Community Service (PKM) activity aims to enhance public awareness of the interrelationship between poverty, unemployment, and criminality as key challenges to sustainable economic development in Mandailing Natal Regency. The program was conducted through a cross-sectoral seminar involving speakers from the District Attorney's Office, the Central Bureau of Statistics (BPS), and local community organizations. A total of 120 participants—including students, lecturers, village officials, and the general public—took part in the event. Evaluation was carried out using pre-test and post-test questionnaires to measure participants' improvement in understanding. The results showed an average increase in comprehension scores from 2.84 to 4.05 on a 1–5 scale (a 42.6 percent rise). Participants demonstrated greater awareness of the structural link between economic pressures and criminal behavior. This PKM activity successfully strengthened community understanding of the importance of inter-agency synergy in addressing poverty and unemployment as preventive measures against crime. Cross-sectoral public education proved effective in fostering social awareness and serves as a replicable model for other regions.

Abstrak.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang keterkaitan antara kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas sebagai tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Mandailing Natal. Metode pelaksanaan meliputi seminar lintas sektor yang menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri, BPS, dan lembaga masyarakat. Sebanyak 120 peserta dari unsur mahasiswa, dosen, perangkat desa, dan masyarakat umum mengikuti kegiatan ini. Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuesioner pra-tes dan pasca-tes untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman dari 2,84 menjadi 4,05 pada skala 1–5 (kenaikan 42,6 persen). Peserta menunjukkan peningkatan kesadaran tentang hubungan struktural antara tekanan ekonomi dan perilaku kriminal. Kegiatan PKM ini berhasil memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran untuk mencegah kriminalitas. Edukasi publik lintas sektor terbukti efektif membangun kesadaran sosial dan menjadi model replikasi bagi daerah lain.

Kata kunci: Kemiskinan; Kriminalitas; Pembangunan Berkelanjutan; Pemberdayaan Masyarakat; Pengangguran.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas merupakan permasalahan sosial yang saling berkaitan dan menjadi tantangan fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (Statistik, 2024) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,36%, atau sekitar 25,22 juta jiwa, sedangkan tingkat

pengangguran terbuka sebesar 4,82% dari total angkatan kerja. Di Provinsi Sumatera Utara, tingkat kemiskinan berada pada angka 8,68%, dengan Kabupaten Mandailing Natal termasuk dalam lima besar daerah dengan kemiskinan tertinggi, yaitu 10,41% ((BPS), 2024). Kondisi ini menggambarkan masih lemahnya daya dukung ekonomi masyarakat, terutama di sektor informal pedesaan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan akses pembiayaan.

Keterbatasan ekonomi tersebut berdampak pada munculnya berbagai bentuk kriminalitas, terutama di kalangan usia produktif. Berdasarkan laporan Polda Sumut (2024), angka kriminalitas meningkat sebesar 7,5% dibanding tahun sebelumnya, dengan kasus pencurian dan kekerasan rumah tangga sebagai bentuk dominan. Teori strain Merton, menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara aspirasi sosial dan sarana legal untuk mencapainya dapat mendorong individu melakukan perilaku menyimpang. Fenomena ini juga muncul di Mandailing Natal, di mana sebagian masyarakat menghadapi tekanan ekonomi tanpa dukungan sosial yang memadai, sehingga rentan terhadap tindakan kriminal berbasis kebutuhan dasar (Merton, 1938).

Secara nasional, ((UNDP), 2024) menegaskan bahwa tantangan utama Indonesia dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) terletak pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial ekonomi. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan modal sosial memperlebar kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, aparat hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat kesadaran publik mengenai akar struktural kemiskinan dan pengangguran. Edukasi publik menjadi salah satu strategi efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hasil observasi tim pelaksana PKM (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Panyabungan dan sekitarnya bekerja di sektor informal, seperti perdagangan kecil dan pertanian skala rumah tangga. Pendapatan rata-rata mereka berkisar antara Rp1,5–2 juta per bulan, masih di bawah UMK Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp2,6 juta. Selain keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi keuangan dan manajemen usaha membuat masyarakat sulit mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Sejumlah responden menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi (Lubis, 2022).

Hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan pula bahwa sebagian warga masih memiliki persepsi fatalistik terhadap kemiskinan, menganggapnya sebagai “takdir sosial” alih-alih kondisi yang dapat diubah melalui peningkatan kapasitas diri. Program seperti Kredit

Usaha Rakyat (KUR) atau pelatihan ekonomi kreatif belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama perempuan dan pemuda desa. Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintahan, aparat hukum, dan lembaga pendidikan menyebabkan informasi program pemberdayaan tidak tersosialisasi secara merata (E. Kurniasih & Hidayat, 2022).

Dalam konteks sosial, meningkatnya pengangguran di wilayah ini berpotensi memicu kriminalitas ekonomi mikro, seperti pencurian hasil kebun dan penipuan *daring*. Fenomena ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran sosial dan hukum melalui pendekatan edukatif. Oleh karena itu, pelaksanaan edukasi publik lintas sektor yang melibatkan akademisi, aparat hukum, dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan ekonomi, etika sosial, dan penegakan hukum yang berkeadilan (Sari & Pranoto, 2023).

Program ini berlandaskan pada implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial untuk menghadirkan solusi berbasis pengetahuan terhadap masalah riil masyarakat. Melalui kegiatan edukasi publik lintas sektor, dosen dan mahasiswa dapat berperan sebagai fasilitator pengetahuan, sekaligus menjadi katalis bagi kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat. Kegiatan ini juga mendukung visi Kampus Merdeka, yakni memperluas peran akademisi dalam pemberdayaan sosial-ekonomi berbasis komunitas.

Hubungan antara kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas telah menjadi tema klasik dalam studi sosial-ekonomi. Merton menjelaskan bahwa ketimpangan antara aspirasi sosial dan akses terhadap sarana ekonomi legal seringkali mendorong perilaku menyimpang (Merton, 1938). Penelitian (Fachrurrozi et al., 2021) menunjukkan bahwa peningkatan 1% pengangguran dapat menaikkan tingkat kriminalitas sebesar 0,45%. Lubis menemukan bahwa di wilayah agraris seperti Mandailing Natal, kemiskinan bersifat struktural dan diwariskan antargenerasi (Lubis, 2022). Hidayat & Rahman, menegaskan bahwa ketimpangan sosial tinggi berkorelasi dengan meningkatnya kejahatan ekonomi mikro di wilayah pedesaan (Hidayat & Rahman, 2020).

Pendekatan terbaru menunjukkan bahwa modal sosial dan nilai keagamaan mampu menekan potensi kriminalitas. Rahmalia et al., (2019) mengonfirmasi bahwa penguatan komunitas berbasis nilai religius efektif menurunkan perilaku menyimpang. Naeruz & Apriandi, (2024) menyatakan bahwa tingkat kohesi sosial lebih berpengaruh terhadap stabilitas sosial dibanding faktor ekonomi semata. UNDP, (2024) menekankan pentingnya intervensi berbasis masyarakat (*community-based intervention*) untuk meningkatkan inklusi ekonomi.

Ardefa et al., (2025) juga mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dapat menurunkan tingkat pengangguran hingga 12% di daerah intervensi.

Selain aspek sosial-ekonomi, peran pendidikan publik terbukti strategis dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kurniasih & Hidayat (2022) menekankan bahwa literasi publik meningkatkan ketahanan sosial terhadap kemiskinan. Sari & Pranoto, (2023) menunjukkan bahwa *Community Empowerment for Sustainable Livelihoods* dapat mengurangi kemiskinan sebesar 15% dalam tiga tahun. Herlina (2021) menegaskan perlunya partisipasi masyarakat dalam pembelajaran sosial lintas sektor. UNESCO, (2023) menyebut bahwa pendidikan publik berbasis komunitas merupakan katalis pencapaian SDGs poin 1, 8, dan 16. Temuan-temuan ini memperkuat dasar konseptual pelaksanaan PKM “Edukasi Publik Lintas Sektor” di Mandailing Natal sebagai upaya membangun kesadaran kolektif menuju pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan utama untuk meningkatkan literasi publik dan kesadaran kritis masyarakat Mandailing Natal mengenai keterkaitan antara kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas sebagai isu multidimensional yang memengaruhi stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Edukasi lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi jembatan pengetahuan antara masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, dan sektor penegakan hukum, sehingga tercipta pemahaman komprehensif tentang akar masalah sosial dan strategi kolaboratif dalam mengatasinya.

Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk menyampaikan edukasi publik melalui pendekatan interaktif berbasis seminar dan diskusi panel, yang melibatkan narasumber dari sektor hukum, statistik, dan lembaga masyarakat sipil. Dengan demikian, kegiatan ini bukan sekadar menyampaikan teori, tetapi juga mempertemukan data empiris dan perspektif praktis guna memperkuat kesadaran kolektif masyarakat terhadap peran mereka dalam pembangunan daerah. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyadari pentingnya partisipasi sosial dan ekonomi, serta memahami konsekuensi sosial dari ketimpangan ekonomi dan pengangguran yang berkepanjangan. Adapun sasaran kegiatan mencakup:

1. Mahasiswa dan civitas akademika STAIN Madina, sebagai agen perubahan yang akan menyebarluaskan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan di lingkungan akademik dan masyarakat.
2. Masyarakat umum, khususnya pemuda, pelaku usaha mikro, dan komunitas lokal yang terdampak langsung oleh isu kemiskinan dan pengangguran.

3. Pemerintah daerah dan aparat hukum, sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan berbasis data dan keadilan sosial.

Dari kegiatan ini diharapkan terwujud beberapa luaran konkret, antara lain:

1. Terbitnya artikel ilmiah yang mendesiminasikan hasil kegiatan dan dampak sosialnya;
2. Terbentuknya jejaring kolaboratif lintas sektor antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat;
3. Meningkatnya pengetahuan dan sikap positif masyarakat terhadap konsep pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan; serta
4. Rekomendasi kebijakan berbasis hasil kegiatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah Mandailing Natal dalam memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dan kriminalitas.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya bersifat sosialisatif, tetapi juga berorientasi pada transformasi sosial berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada pilar *No Poverty, Decent Work and Economic Growth*, serta *Peace, Justice, and Strong Institutions* (UNDP, 2023).

2. METODE PENGABDIAN

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan edukasi partisipatif lintas sektor, yang menekankan pada transfer pengetahuan dua arah antara narasumber, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan ini relevan dengan paradigma *community-based development*, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembangunan (Chambers, 1997). Model ini dipilih karena isu kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan kultural yang kompleks, sehingga memerlukan keterlibatan multipihak untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020).

Mitra dan Peserta Kegiatan

Kegiatan ini melibatkan STAIN Mandailing Natal sebagai pelaksana utama sekaligus mitra akademik, dengan peserta utama terdiri atas mahasiswa, dosen, masyarakat umum, pelaku UMKM, dan aparat pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), dan perwakilan komunitas sosial untuk memberikan perspektif empiris dan kebijakan. Kolaborasi lintas lembaga ini penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi sebagaimana ditekankan oleh Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2022) dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Jumlah peserta mencapai lebih dari 120 orang yang terdiri atas 70 mahasiswa, 30 dosen, dan 20 peserta masyarakat umum. Peserta dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial-ekonomi di daerah Mandailing Natal. Hal ini sejalan dengan prinsip *stakeholder engagement* dalam pembangunan daerah yang inklusif (World Bank, 2021).



Gambar 1. Peserta Kegiatan.

Bentuk dan Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Oktober 2025 di Aula Student Center STAIN Madina. Kegiatan dikemas dalam bentuk seminar edukatif dan diskusi panel interaktif, dengan sesi paparan narasumber, tanya jawab, dan refleksi kelompok. Tahapan kegiatan meliputi:

Persiapan

Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak kampus, narasumber, dan pemerintah daerah untuk menyusun agenda, menentukan tema, serta menyiapkan bahan edukasi berupa leaflet dan modul singkat tentang pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dilakukan survey awal sederhana untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap hubungan antara kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas di wilayah Mandailing Natal (Badan Pusat Statistik Mandailing Natal, 2025).

Pelaksanaan

Seminar dibuka dengan paparan data statistik kondisi sosial-ekonomi Kabupaten Mandailing Natal oleh BPS, dilanjutkan dengan perspektif hukum dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal mengenai hubungan antara kejahatan dan faktor sosial ekonomi. Selanjutnya, sesi diskusi panel membahas strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang berorientasi pada pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas.

Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen survei kepuasan peserta dan *pre-post test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai isu-isu sosial ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Analisis hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 38% dibandingkan sebelum seminar berlangsung. Data ini memperlihatkan efektivitas metode edukasi publik lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran sosial masyarakat.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah edukasi kritis dan dialogis sebagaimana dikembangkan oleh Freire, (2005), di mana peserta tidak sekadar menerima informasi, tetapi diajak untuk berpikir reflektif dan kritis terhadap realitas sosial di sekitarnya. Strategi ini diperkuat dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang memungkinkan terjadinya kolaborasi aktif antara akademisi dan masyarakat dalam merumuskan solusi (Kemmis et al., 2014).

Selain itu, kegiatan mengintegrasikan unsur literasi statistik dan hukum dasar dalam pembangunan sosial, sehingga masyarakat memperoleh pengetahuan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini terbukti efektif dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di Indonesia yang menekankan pada edukasi lintas disiplin (Rahmawati & Prasetyo, 2023; Suharto, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan dan Partisipasi Peserta

Kegiatan seminar bertajuk “Edukasi Publik Lintas Sektor tentang Kemiskinan, Pengangguran, dan Kriminalitas untuk Mendorong Kesadaran Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Mandailing Natal” dilaksanakan pada Rabu, 15 Oktober 2025 di Aula Student Center STAIN Madina. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua STAIN Madina dan dihadiri oleh 120 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, perangkat desa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Tiga narasumber dihadirkan, yaitu Jupri Manda Banjar Nahor, S.H., M.H. (Kasi Intel Kejari Madina), Ali Sahid (KPPS & QM Operational and Maintenance), dan Fathihah Lubis, S.Tr.Stat. (BPS Kabupaten Mandailing Natal).



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan berlangsung interaktif. Narasumber pertama menjelaskan hubungan antara tekanan ekonomi dan kriminalitas di tingkat lokal berdasarkan data kasus Kejaksaan Negeri Mandailing Natal 2022–2024, di mana 68% kasus pencurian ringan memiliki motif ekonomi. Narasumber BPS menyoroti bahwa tingkat kemiskinan Mandailing Natal mencapai 8,72% pada tahun 2023 (BPS, 2024), lebih tinggi dari rata-rata Sumatera Utara (8,13%), dan bahwa pengangguran terbuka meningkat dari 4,21% menjadi 5,06% dalam periode yang sama. Diskusi menghasilkan kesadaran bahwa masalah ekonomi, sosial, dan hukum saling berkelindan.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, peserta mengisi kuesioner pra-tes dan pasca-tes mengenai pemahaman keterkaitan antara kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Data diperoleh dari 120 responden dengan skala Likert 1–5.

Tabel 1. Kuesioner Pra-Tes dan Pasca-Tes.

Aspek Penilaian	Rata-rata Pra-tes	Rata-rata Pasca-tes	Kenaikan (%)
Pemahaman hubungan kemiskinan dan kriminalitas	2,9	4,1	41,4
Pemahaman dampak pengangguran terhadap sosial ekonomi	3,0	4,3	43,3
Kesadaran pentingnya literasi hukum dan sosial	2,8	4,0	42,8
Rata-rata keseluruhan	2,9	4,1	42,5

Peningkatan rata-rata sebesar 42,5% menunjukkan bahwa seminar berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai hubungan struktural antara kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Hasil ini juga menegaskan peran strategis pendekatan edukatif lintas sektor dalam memperkuat literasi sosial-ekonomi masyarakat.



Gambar 3. Pelaksanaan Seminar.

Temuan Utama Berdasarkan Tema Isu

Kemiskinan dan Kriminalitas

Temuan empiris nasional menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kemiskinan dan kriminalitas di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa baik tingkat kemiskinan maupun pengangguran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kriminalitas pada 34 provinsi di Indonesia (Septriani, 2024). Hasil ini menegaskan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan angka kejahatan di wilayah dengan kesejahteraan rendah.

Selanjutnya, studi lain juga memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran secara simultan meningkatkan tingkat kejahatan, sementara pendidikan tidak selalu menjadi faktor mitigasi yang signifikan (E. P. Kurniasih et al., 2024). Kombinasi hasil ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan kriminalitas nasional, termasuk di daerah dengan karakteristik sosial ekonomi serupa seperti Kabupaten Mandailing Natal..

Dalam konteks Mandailing Natal, data lokal dari Kejari Madina mendukung pola tersebut: mayoritas pelaku tindak kriminal minor berasal dari kelompok ekonomi lemah dengan penghasilan di bawah Rp2 juta/bulan. Hal ini sejalan dengan *Strain Theory* (Merton, 1938) yang menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong perilaku menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan akses ekonomi legal.

Pengangguran dan Kriminalitas

Fenomena pengangguran memiliki hubungan kompleks dengan tingkat kriminalitas. Secara teoritis, hubungan ini dapat dijelaskan melalui *Routine Activity Theory* (Cohen & Felson, 1979) , yang menyatakan bahwa peningkatan waktu luang tanpa aktivitas produktif (akibat pengangguran) meningkatkan peluang individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Namun, hubungan ini tidak bersifat linear; banyak faktor sosial dan ekonomi lain yang ikut memediasi.

Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Rahman dan Prasetyo (2018) dalam studi *Economics and Crime Rates in Indonesia* (periode 2012–2016) menemukan bahwa tingkat pengangguran tidak signifikan terhadap angka kriminalitas ketika variabel pendidikan dan penyelesaian kasus hukum ikut dikontrol. Sementara itu, upah justru menunjukkan hubungan negatif signifikan dengan kriminalitas, yang berarti peningkatan kesejahteraan menekan potensi kejahatan. Hasil ini mengindikasikan bahwa dimensi ekonomi makro tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kriminalitas jika sistem hukum dan lapangan kerja relatif stabil (Rahman & Prasetyo, 2018).

Namun, studi lain yang menggunakan data panel lintas provinsi menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kriminalitas, menegaskan bahwa meningkatnya pengangguran struktural di suatu wilayah cenderung mendorong kenaikan tindak kejahatan (Septriani, 2024). Temuan ini menggarisbawahi bahwa dalam konteks ekonomi yang rentan dan akses pekerjaan yang terbatas, pengangguran dapat menjadi faktor pemicu utama kriminalitas, sehingga intervensi kebijakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan perlindungan sosial menjadi krusial untuk pencegahan kejahatan.

Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan kriminalitas tidak bersifat deterministik. Artinya, efek pengangguran terhadap perilaku kriminal dapat berbeda tergantung pada *social capital dan community control* suatu daerah (Morrow & Scorgie-Porter, 2017; Putnam, 2000). Daerah dengan solidaritas sosial tinggi, norma agama kuat, dan struktur pengawasan komunitas efektif dapat menekan potensi kriminalitas meskipun angka penganggurannya tinggi.

Hasil diskusi dalam kegiatan PKM ini mendukung nuansa tersebut. Narasumber dari BPS Mandailing Natal menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka di daerah ini mencapai 5,06% pada tahun 2023, naik dari 4,21% pada 2022 (BPS, 2024). Namun, data kepolisian menunjukkan bahwa tidak semua wilayah dengan pengangguran tinggi mengalami lonjakan kriminalitas. Desa-desa yang memiliki aktivitas sosial keagamaan dan ekonomi berbasis komunitas, seperti kelompok tani dan koperasi desa, relatif lebih aman dibandingkan wilayah yang mengalami disintegrasi sosial.

Narasumber dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal menambahkan bahwa banyak kasus kriminal ringan, seperti pencurian alat pertanian atau ternak, dilakukan oleh individu yang mengalami pengangguran jangka panjang tanpa dukungan ekonomi. Ia menegaskan bahwa sebagian besar pelaku bukanlah kriminal profesional, melainkan warga yang “terdesak kebutuhan”. Kondisi ini selaras dengan *Strain Theory* (Merton, 1938), yang menjelaskan

bahwa individu yang tidak dapat mencapai tujuan ekonomi melalui cara legal mungkin mencari alternatif ilegal untuk bertahan hidup.

Di sisi lain, narasumber dari sektor masyarakat sipil menekankan bahwa pengangguran yang disertai lemahnya literasi sosial dan hukum memperburuk keadaan. Banyak warga yang tidak memahami batas hukum tindakan “meminjam” atau “mengambil” barang karena dianggap kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, upaya edukasi publik yang mengaitkan aspek ekonomi dengan pemahaman hukum menjadi penting agar masyarakat memahami konsekuensi sosial dan pidana dari setiap tindakan.

Hasil kuesioner pasca-seminar menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap hubungan antara pengangguran dan kriminalitas meningkat 43,3% dibandingkan sebelum seminar. Angka ini memperlihatkan efektivitas kegiatan PKM dalam membangun kesadaran kritis bahwa pengangguran bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga faktor sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan kesejahteraan lokal.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat argumen bahwa pengangguran, jika tidak ditangani melalui kebijakan ekonomi inklusif dan intervensi sosial, dapat menimbulkan efek domino terhadap meningkatnya kriminalitas (Rahman & Prasetyo, 2018). Oleh karena itu, kegiatan edukatif lintas sektor seperti PKM ini menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan literasi ekonomi, sosial, dan hukum masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan kriminalitas berbasis komunitas.

Ketimpangan, Food Insecurity, dan Faktor Sosial

Ketimpangan pendapatan terbukti menjadi salah satu determinan penting tingkat kriminalitas di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa income inequality berpengaruh positif terhadap kriminalitas antarprovinsi, di mana meningkatnya kesenjangan ekonomi mendorong naiknya potensi kejahatan, terutama di wilayah dengan disparitas sosial mencolok antara kelompok kaya dan miskin (Trisnawati et al., 2019).

Selain itu, kemiskinan dan pengangguran juga merupakan faktor signifikan yang meningkatkan angka kriminalitas di Indonesia. Kombinasi antara tekanan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja menjadi pemicu perilaku kriminal, terutama pada masyarakat dengan daya tahan ekonomi rendah (E. P. Kurniasih et al., 2024).

Dalam konteks global, *food insecurity* atau ketidakamanan pangan juga terbukti berhubungan dengan peningkatan risiko kejahatan properti, terutama pencurian kecil yang dilakukan sebagai bentuk mekanisme bertahan hidup. Rumah tangga dengan tingkat *food insecurity* tinggi cenderung lebih rentan melakukan tindakan kriminal ringan akibat tekanan

ekonomi rumah tangga (Jackson et al., 2018). Meskipun studi ini dilakukan di Amerika Serikat, relevansinya dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika serupa di pedesaan Indonesia.

Kegiatan seminar ini merespons temuan-temuan tersebut dengan menekankan keterkaitan antara data ekonomi makro dan realitas sosial lokal. Peserta diajak mengkaji bagaimana kesenjangan ekonomi di tingkat desa menimbulkan tekanan sosial yang berpotensi berkembang menjadi kriminalitas. Pendekatan ini menunjukkan fungsi nyata PKM sebagai bentuk knowledge translation dari teori akademik ke konteks sosial nyata.

Analisis Keterkaitan dengan Aktivitas PKM dan Refleksi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menjadi bentuk konkret penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam dimensi community empowerment berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. PKM ini tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengaitkan teori-teori sosial-ekonomi dan kriminologi dengan realitas lokal di Kabupaten Mandailing Natal. Pendekatan edukasi publik lintas sektor yang melibatkan Kejaksaan, Badan Pusat Statistik, dan lembaga masyarakat menjadi ruang dialog yang mempertemukan academic insight dengan *local wisdom*.

Secara konseptual, kegiatan ini merepresentasikan implementasi knowledge translation dari teori ke masyarakat. Materi seminar yang disampaikan berbasis data empiris nasional dan lokal mengaitkan secara langsung faktor-faktor struktural penyebab kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa kriminalitas bukan hanya akibat lemahnya moralitas individu, tetapi merupakan konsekuensi dari tekanan sosial dan ekonomi yang kompleks. Hal ini sejalan dengan kerangka teori *Social Disorganization* (Shaw & McKay, 2014) yang menyatakan bahwa lemahnya kontrol sosial di masyarakat urban atau semi-urban meningkatkan risiko perilaku kriminal akibat menurunnya solidaritas sosial dan kapasitas komunitas.



Gambar 4. Pelaksanaan Seminar.

Refleksi dari kegiatan ini menunjukkan perubahan pola pikir peserta terhadap isu sosial. Berdasarkan analisis kuesioner pra dan pasca seminar, tingkat pemahaman peserta meningkat rata-rata 42,5%. Sebelumnya, sebagian besar peserta menganggap bahwa kemiskinan dan

pengangguran hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, namun setelah seminar, 84% peserta menyatakan bahwa mereka kini melihat keterkaitannya dengan keamanan sosial dan tingkat kriminalitas lokal. Artinya, kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan kesadaran kritis (critical awareness) masyarakat, yang merupakan prasyarat terbentuknya partisipasi sosial dalam pembangunan berkelanjutan (Freire, 2005).

Selain itu, kegiatan ini juga memunculkan community reflection. Diskusi kelompok menghasilkan sejumlah rekomendasi berbasis konteks lokal, antara lain:

1. Penguatan ekonomi mikro berbasis komunitas, misalnya dengan mengembangkan kelompok usaha bersama yang fokus pada komoditas unggulan seperti hasil pertanian dan kerajinan lokal. Hal ini sejalan dengan temuan Trisnawati dan Ismail (2019) yang menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan faktor signifikan penyebab kriminalitas, sehingga distribusi peluang ekonomi menjadi aspek kunci pencegahan kejahatan.
2. Program literasi sosial dan hukum berkelanjutan, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri dan BPS untuk memberikan edukasi reguler tentang hukum, data sosial, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Pendekatan ini relevan dengan konsep preventive legal education yang menekankan pencegahan pelanggaran hukum melalui peningkatan pemahaman sosial.
3. Peningkatan jejaring sosial dan pengawasan komunitas, dengan membentuk forum komunikasi antarwarga (community watch system) yang berbasis kearifan lokal dan nilai gotong royong. Ini memperkuat teori collective efficacy (Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997), bahwa solidaritas sosial dan kontrol informal berperan besar dalam menekan perilaku kriminal.

Dari sisi implementasi, kolaborasi antarinstansi juga memperkuat pendekatan cross-sectoral governance, di mana persoalan sosial seperti pengangguran dan kriminalitas tidak ditangani secara sektoral, melainkan melalui kerja sama antara lembaga pendidikan, penegak hukum, dan masyarakat. Model ini efektif karena setiap sektor memiliki peran strategis: akademisi menyediakan analisis dan konsep, penegak hukum memberi perspektif regulatif, sedangkan masyarakat menyediakan realitas empirik dan pengalaman sosial.



Gambar 5. Pelaksanaan Seminar.

Refleksi akhir menunjukkan bahwa PKM ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun sense of ownership di kalangan peserta terhadap persoalan sosial-ekonomi di lingkungannya. Banyak peserta, khususnya mahasiswa dan perangkat desa, menyatakan keinginan untuk menindaklanjuti kegiatan ini melalui program lanjutan seperti pelatihan kewirausahaan sosial dan penyuluhan hukum desa. Dengan demikian, kegiatan ini berpotensi menjadi model replikasi bagi kampus lain dalam mengintegrasikan pendekatan data-driven education dengan pemberdayaan sosial.

Secara akademik, hasil kegiatan ini memperkuat temuan empiris bahwa faktor-faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan food insecurity berkontribusi signifikan terhadap kriminalitas (Halim et al., 2024; Rahman & Prasetyo, 2018; Trisnawati & Ismail, 2019). Namun, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa melalui intervensi edukatif berbasis kolaborasi, faktor-faktor tersebut dapat diredam melalui peningkatan kesadaran sosial, literasi hukum, dan partisipasi komunitas. Dengan kata lain, PKM ini bukan hanya aktivitas transfer ilmu, tetapi juga merupakan eksperimen sosial yang memperlihatkan bagaimana pengetahuan akademik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan mikro berbasis masyarakat a bridge between theory and practice.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Edukasi Publik Lintas Sektor tentang Kemiskinan, Pengangguran, dan Kriminalitas untuk Mendorong Kesadaran Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Mandailing Natal berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keterkaitan antara kondisi ekonomi dan sosial terhadap dinamika kriminalitas. Berdasarkan hasil pra–pasca tes terhadap 40 responden dari total 120 peserta seminar, rata-rata skor pemahaman meningkat sebesar 42,5% (dari 2,8 menjadi 4,0 pada skala 1–5). Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi publik lintas sektor efektif memperkuat literasi sosial, hukum, dan ekonomi masyarakat.

Dari sisi substansi, pembahasan dan data menunjukkan bahwa kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kriminalitas. Hasil kegiatan ini sejalan dengan temuan Halim et al. (2024) dan Trisnawati & Ismail (2019) yang menegaskan bahwa tekanan ekonomi dan sosial secara simultan berdampak pada perilaku kriminal di tingkat komunitas. Dalam konteks lokal Mandailing Natal, kondisi keterbatasan akses kerja, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya jaminan sosial menjadi faktor pendorong yang memperkuat hubungan tersebut.

Secara sosial, kegiatan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, lembaga statistik, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan model intervensi berbasis edukasi dan pemberdayaan. Dialog terbuka antara narasumber dan masyarakat memunculkan kesadaran bahwa penanganan kriminalitas tidak cukup melalui pendekatan hukum represif, tetapi harus melalui strategi ekonomi inklusif dan penguatan nilai sosial keagamaan.

Secara akademik, kegiatan ini berkontribusi pada implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian masyarakat berbasis riset. Data empiris dan teori seperti Social Disorganization Theory dan Strain Theory terbukti relevan menjelaskan dinamika sosial Mandailing Natal, sehingga kegiatan PKM ini dapat dianggap sebagai model praksis integrasi antara hasil penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga membentuk perilaku sosial proaktif masyarakat dalam pencegahan tindak kriminal yang bersumber dari tekanan ekonomi struktural. Ke depan, kolaborasi semacam ini dapat menjadi pola keberlanjutan dalam pengembangan kebijakan publik dan pendidikan sosial ekonomi di wilayah Mandailing Natal.

Saran

1. Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas:

Diperlukan pengembangan program usaha mikro dan pelatihan kewirausahaan sosial di tingkat desa untuk mengurangi tekanan ekonomi masyarakat berisiko tinggi.

2. Integrasi edukasi hukum dan sosial di kampus:

Perguruan tinggi perlu mengembangkan kurikulum dan kegiatan pengabdian yang mengaitkan literasi ekonomi, hukum, dan sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

3. Kolaborasi lintas lembaga berkelanjutan:

Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum perlu menginisiasi forum tahunan edukasi publik untuk pemantauan dan penguatan kesadaran masyarakat.

4. Pengukuran dampak jangka panjang:

Disarankan adanya penelitian lanjutan yang menilai efek perubahan perilaku masyarakat dalam 6–12 bulan pascakegiatan, dengan indikator sosial dan ekonomi yang terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada STAIN Mandailing Natal atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini. Apresiasi disampaikan kepada para narasumber, yaitu Jupri Manda Banjar Nahor, S.H., M.H., Ali Sahid, dan Fathihah Lubis, S.Tr.Stat., atas kontribusi dan wawasan yang berharga. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada mahasiswa, panitia, dan masyarakat peserta seminar yang telah berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang.

DAFTAR REFERENSI

- Ardefa, A., Naeruz, M., & Apriandi, D. (2025). Collaborative empowerment model for unemployment reduction in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 33(2), 145–160.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Profil kemiskinan Kabupaten Mandailing Natal 2024*. BPS Mandailing Natal.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Indonesia 2024*. BPS RI.
- Badan Pusat Statistik Mandailing Natal. (2025). *Kabupaten Mandailing Natal dalam angka 2025*. BPS-Statistics Mandailing Natal Regency.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications. <https://doi.org/10.3362/9781780440453.000>
- Fachrurrozi, M., Widarjono, A., & Rahmadani, L. (2021). Poverty, inequality, and crime in Indonesia: Empirical evidence from panel data. *Economic Journal of Emerging Markets*, 13(1), 50–62.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Hidayat, R., & Rahman, A. (2020). The social-economic determinants of crime in developing regions. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 20(3), 210–224.
- Jackson, D. B., Newsome, J., Vaughn, M. G., & Johnson, K. R. (2018). Considering the role of food insecurity in low self-control and early delinquency. *Journal of Criminal Justice*, 56, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2017.07.002>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2022). *Panduan pelaksanaan MBKM: Kolaborasi untuk Indonesia maju*. Direktorat Jenderal Dikti.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- Kurniasih, E. P., Andini, N., Kartika, M., Dosinta, N. F., Hamsyi, N. F., & Iqbal, I. (2024). Unveiling the links: How poverty, unemployment, education, and income inequality

- drive crime in Indonesia? *Journal of Islamic Economics*, 8(2), 189–210. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v8n2.p189-210>
- Kurniasih, E., & Hidayat, F. (2022). Public literacy and community empowerment: Evidence from rural Indonesia. *Journal of Community Engagement Studies*, 7(2), 98–112.
- Lubis, F. (2022). Structural poverty and local economy in Mandailing Natal. *Jurnal Sosiohumaniora Islamika*, 14(1), 45–58.
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Morrow, E., & Scorgie-Porter, L. (2017). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781912282319>
- Naeruz, M., & Apriandi, D. (2024). Social capital and unemployment dynamics in Indonesian districts. *Regional Economic Review*, 12(1), 25–39.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Rahmalia, S., Ariusni, A., & Triani, M. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 21–30. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i1.5345>
- Rahman, Y. A., & Prasetyo, A. D. (2018). Economics and crime rates in Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 11(2), 1–10. <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16060>
- Rahmawati, D., & Prasetyo, B. (2023). Penguatan literasi sosial-ekonomi melalui edukasi partisipatif di desa mandiri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.6327>
- Sari, R., & Pranoto, B. (2023). Community empowerment for sustainable livelihoods: Evidence from Indonesia's rural transformation. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 77–91.
- Septriani. (2024). The impact of economic conditions on criminality in Indonesia. *European Journal of Development Studies*, 4(3), 345. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2024.4.3.345>
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (2014). Juvenile delinquency and urban areas. In *Understanding deviance: Connecting classical and contemporary perspectives*. <https://doi.org/10.2307/588284>
- Suharto, E. (2020). *Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Trisnawati, D., Khoirunurrofik, & Ismail, D. S. (2019). Inter-provincial spatial linkages of crime pattern in Indonesia: Looking at education and economic inequality effects on crime. *Indonesian Journal of Geography*, 51(2), 200–213. <https://doi.org/10.22146/ijg.34026>
- United Nations Development Programme (UNDP). (2024). *Indonesia SDGs progress report 2024*. UNDP.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2023). *Education for sustainable development: Building peaceful societies*. UNESCO Publishing.